

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*
DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Rahma Nur Widiastuti

Nim : 31402000245

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *PROFITABILITAS*, *LEVERAGE*, DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020)**

Disusun Oleh :

Rahma Nur Widiasuti

NIM : 31402000245

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 September 2022

Pembimbing,

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية

Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt.

NIK. 211403015

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020)

Disusun Oleh:

Rahma Nur Widayanti

NIM: 31402000245

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 18 November 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

[Signature]
Zudi Budiman, S.E., M.Sc., Akt.
NIK 211403015

Penguji I

[Signature]
Ruslan Hanafi, S.E., M.Sc., Akt., CA
NIK 211403011

Penguji II

[Signature]
Ahmad Hori Alifan, S.E., M.Si
NIK 211421032

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 18 November 2022

جامعته سلطان اَبوبوعِيسَة
Ketur Program Studi Akuntansi



[Signature]
Pratiwi Widyanti, S.E., M.Si
NIK 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Nur Widiastuti

NIM : 31402000245

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020)" dan diajukan untuk diuji pada tanggal 18 November 2022 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atas keseluruhan tulisan saya, meniru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik Skripsi yang saya ajukan apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah – olah tulisan saya sendiri, dan saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan universitas dibatalkan.

Semarang, 05 Maret 2023

Yang memberi Pernyataan



Rahma Nur Widiastuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data yang sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, serta metode *purposive sampling* dalam penelitian terdapat 68 populasi dan 228 sampel yang memenuhi kriteria.

Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *corporate social responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*

Kata Kunci : kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*.

INTISARI

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *profitabilitas*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015- 2017.

Hasil – hasil penelitian terdahulu dari Mahdiana & Amin (2020) ,I Made Surya Dharma, Putu Agus Ardiana (2016) , dan Pahursip & Simarmata (2022) memiliki ketidaksamaan dalam penelitian, hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *profitabilitas*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2015 – 2020, adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 38 perusahaan selama 6 tahu sebanyak 228. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS menunjukkan hasil Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* , *corporate social responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Profitabilitas, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020)”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Gunarto., S.H M.Hum. selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Judi Budiman,SE,M.Sc., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan cermat dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil maksimal.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Drs. Karyono dan Almahurmah Ibu Nur Hidayati dan Adik saya Afrienda Rusma Aji yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan baik moril serta materil dalam menyelesaikan studi ini
7. Teman-teman seperjuangan Universitas Islam Sultan Agung
8. Untuk sahabat sahabatku Citra, Ella, Ainun, Mbak Indri, Yolan yang sudah selalu menemani.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang,

Yang membuat pernyataan

Rahma Nur Widiastuti

31402000245

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB I IKAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori <i>Keagenan</i>	12
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	13
2.1.3 Corporate Governance	14
2.1.4 Profitabilitas	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 <i>Corporate Social Responsibility</i>	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Leverage	24
2.1 Sales Growth	25
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33

2.3.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.3.3	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.3.4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2.3.5	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
2.3.6	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
2.3.7	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	39
2.3.8	Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
2.4	Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian.....	42
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Definisi Variabel dan Operasionalnya.....	46
3.6	Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.2	Hasil Penelitian	58
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.3	Uji Hipotesis.....	67
4.3	Pembahasan	73
4.3.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	73
4.3.2	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
4.3.3	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
4.3.4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	75
4.3.5	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	75
4.3.6	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	77
4.3.7	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	77
4.3.8	Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		79
5.1	Kesimpulan	79

5.3 Saran80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Litbang CNBC Indonesia Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. 1 Proses Penarikan Sampel Penelitian	56
Tabel 4. 2 Daftar Subjek Penelitian	57
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Normalitas	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov (Sesudah Otulier)	63
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas.....	65
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi	66
Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi (Run Test)	67
Tabel 4. 10 Analisis Regresi Linier Berganda.....	68
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi	70
Tabel 4. 12 Uji F.....	70
Tabel 4. 13 Uji T.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang KUP dalam peraturan Pelaksanaannya, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tetapi dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kepada negara.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk belanja negara, baik untuk belanja negara rutin maupun belanja negara untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menghimbau agar wajib pajak taat dan patuh untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, karena pajak dari kita untuk kita.

Pada realitanya, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, karena menurut wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang besar merupakan sebuah beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh baik pribadi maupun perusahaan, sehingga wajib pajak menginginkan membayar pajak seminimal mungkin setiap bulannya. Sedangkan pemerintah memiliki target dan menginginkan penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat. Dengan adanya sebuah perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang besar, terlebih sebuah perusahaan.

Tax Avoidance adalah perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. *Tax Avoidance* dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang penghindaran pajak, oleh karena itu praktik *tax avoidance* di Indonesia merupakan hal yang legal. Bagi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak bisa dikenakan sanksi atas *tax avoidance* yang telah dilakukannya, di Indonesia yang melakukan kasus praktik ini dari tahun ke tahun masih cukup banyak. Dengan masih cukup banyak praktik penghindaran pajak di Indonesia berdampak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 68,7 Triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak, akibatnya akan menimbulkan kerugian seperti pembangunan nasional menjadi tidak optimal. Fenomena dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak lima tahun terakhir tak tercapai target. Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan Negara. Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.577,6 Triliun atau hampir 82,5 persen dari total penerimaan negara. Pendapatan negara di APBN 2019 ditargetkan mencapai Rp2.165,1 triliun. Penerimaan perpajakan memperoleh porsi 82,5 persen dari APBN 2019. Jika dirupiahkan penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun (Kepabean dan Cukai sebesar Rp 208,8 triliun dan Pajak Rp1.577,6 triliun) (www.pajak.go.id). Data Litbang CNBC Indonesia, berikut target dan realisasi penerimaan pajak lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Litbang CNBC Indonesia Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2016	Rp. 1.539 triliun	Rp.1.283 triliun	83,4
2	2017	Rp. 1.283 triliun	Rp.1.147 triliun	89,4

3	2018	Rp. 1.424 triliun	Rp.1.315,9 triliun	92
4	2019	Rp. 1.577,6 triliun	Rp.1.332,1 triliun	84,4
5	2020	Rp. 1. 198,8triliun	Rp.1.069,5 triliun	89,2

Sumber : www.cnbcindonesia.com

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target, ada dua hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu *Tax Evasion* (penggelapan pajak) dan *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan.

Pembayaran pajak kepada pemerintah dianggap tidak memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan rakyat yang memiliki perusahaan enggan untuk membayar pajak. Maka perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dan mengoptimalkan laba sehingga dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan tidak membayar pajak dengan semestinya, praktik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Apabila praktik penghindaran pajak ini diketahui oleh masyarakat maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap perusahaan, perusahaan akan kehilangan legitimasi dari publik dan perusahaan mengalami kebangkrutan (Pradipta & Supriyadi, 2015a).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lemahnya *Corporate Governance* di dalam sebuah badan usaha. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem atau seperangkat aturan yang diharapkan dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuannya yang menetapkan hubungan pengurus, pemegang saham, karyawan serta pihak lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Karakteristik *Corporate Governance* di dalam badan usaha akan menentukan bagaimana sebuah badan usaha menerapkan manajemen pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam sebuah perusahaan membutuhkan adanya kepemilikan institusional yang merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap kegiatan

investasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk investasi saham yang sangat penting bagi perusahaan, dalam melaksanakan tanggung jawabnya biasanya institusionalakan menyerahkan wewenang tanggung jawabnya kepada salah satu divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Dalam meningkatkan kinerja badan usaha dan karyawan diperlukan pengawasan. Untuk meningkatkan pengawasan dalam kinerja memerlukan komite audit yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan dan mengawasi sistem pengendalian internal dalam badan usaha. Selain itu dalam badan usaha dibutuhkan komisaris independen yang merupakan komisaris dari pihak eksternal yang tidak memiliki ikatan hubungan dengan manajemen badan usaha maupun dengan pihak lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dengan independen, tidak semata-mata melakukan suatu tugas untuk kepentingan badan usaha. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi kepentingan manajemen dan investor serta memastikan dilaksanakan teori agensi dengan baik (Amin & Suyono, 2020). Kepemilikan manajerial juga memainkan penting dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau prosentase saham yang dimiliki oleh komisaris, dewan direksi, dan manajemen yang tercantum di dalam daftar pemegang saham. Pendekatan keagenan mengganggu struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan antara berbagai klaim (claim holder) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun pada tahun 2020. Temuan ini diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang diperkirakan merugikan Indonesia sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, kurs yang digunakan saat penutupan

pasar spot senin (22/11) sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari laporan tersebut *Tax Justice Network* menyatakan Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. (Dikutip Senin, 23 November 2020, [Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak \(kontan.co.id\)](#)). Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Selain *Corporate Governance*, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi juga oleh faktor yang lain yaitu *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap lingkungan sekitar dimana badan usaha itu berdiri maupun tindakan sosial, seperti melakukan kegiatan yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan penghijauan, donor darah, program beasiswa, dan lain-lain. Di Indonesia badan usaha wajib bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74. Badan usaha yang telah menerapkan CSR dengan baik, sesuai dengan porsi yang dianggarkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka para *stakeholder* akan tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh badan usaha tersebut, dengan adanya ketertarikan ini menunjukkan badan usaha sudah mematuhi peraturan sesuai dengan Undang-Undang maka akan menarik *stakeholder* untuk menanam modalnya, dengan adanya penanaman modal serta modal dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan laba. Badan usaha yang rendah dalam melakukan tanggung jawab terhadap *Corporate social responsibility* kepada lingkungan sekitarnya, hal tersebut memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang tinggi, karena kewajiban badan usaha kepada lingkungan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada apalagi harus membayar pajak ke negara.

Selain kedua faktor diatas penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan yaitu Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Penelitian Sulaeman (2021) menunjukkan hasil analisis data diperoleh bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Namun penelitian (Pramudya, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu indikator terpenting yang ada di perusahaan karena mencerminkan suatu tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Dengan nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengolah aset-aset perusahaan dengan efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat membayar beban pajak perusahaan. Perusahaan yang cenderung memperoleh persentase laba lebih tinggi maka akan lebih memilih membayar beban pajak daripada melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sebaliknya perusahaan yang memperoleh persentase laba yang rendah memilih tidak taat untuk membayar beban pajak guna untuk mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

Sedangkan untuk pengertiannya *Leverage* adalah rasio yang memiliki fungsi untuk mengetahui setiap modal sendiri dalam rupiah yang dijadikan sebagai jaminan utang, semakin tinggi jumlah pendanaan utang yang digunakan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan (Ismi Aulia, 2020). Perhitungan *Leverage* dihitung dengan menggunakan rasio hutang pada asset (DAR). *Leverage* dapat dihitung dengan membagi total hutang dibagi dengan total asset (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andin, 2016). Perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih

banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan, utang yang dimiliki oleh perusahaan menimbulkan biaya tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, maka beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan semakin besar (Pradipta & Supriyadi, 2015a). Semakin tinggi tingkat hutang maka akan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya praktik penghindaran perusahaan oleh perusahaan adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas perusahaan lainnya (Dharma & Ardiana, 2016a).

Rasio keuangan lainnya yaitu *sales growth*. *Sales growth* merupakan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Apabila dalam sebuah perusahaan tingkat volume penjualan meningkat menandakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang meningkat, keuntungan meningkat yang diperoleh oleh perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar.

Penelitian dengan variabel dependennya Penghindaran pajak dengan melakukan variasi terhadap variabel independennya telah banyak dilakukan. Variabel independen yang digunakan biasanya adalah *Corporate Governance*, *Corporate social responsibility*, divariasi dengan rasio keuangan biasanya *profitabilitas*, *leverage*, *sales growth* serta ukuran perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sukartha, 2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Asset*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak memberikan kesimpulan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh pada penghindaran pajak sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pada penghindaran pajak untuk ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktovian pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013) yang memiliki kesimpulan *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*, penelitian (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andin, 2016) yang berjudul Pengaruh Komite Audit,

Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (*DER*) dan Profitabilitas (*ROA*) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing di BEI Periode Tahun 2011-2013 yang memiliki kesimpulan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat hasil penelitian yang ketidakkonsistenan, dengan adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian antara penelitian sebelumnya, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan hal tersebut perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel *Corporate Governance* serta tidak memasukan variabel ukuran perusahaan tetapi menggantikannya dengan variabel *Sales Growth*.

Berikut beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia yang mampu menguatkan penelitian ini. Beberapa perusahaan sektor manufaktur yang melakukan *tax avoidance* diantaranya perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (*BAT*) yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dari adanya strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari hutang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Hal ini secara signifikan memperburuk kerugian di Indonesia, biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. (Dikutip Rabu, 08 Mei 2020 <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>).

Kasus penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh perusahaan besar manufaktur di Indonesia, yaitu PT Coca Cola Indonesia (*CCI*). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP menyatakan adanya pembengkakan biaya yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar, sedangkan perhitungan CCI hanyalah Rp 429,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (*PPh*) CCI Rp

49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. (Dikutip Jumat, 13 Juni 2014, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2014/06/13/1135319/cocacola-diduga-akali-setoran-pajak>).

Menurut laporan *Global Witness*, Adaro sebagai badan usaha dikatakan melakukan transfer pricing. Dimana transfer pricing dapat dikategorikan sebagai tax avoidance, karena secara legal telah memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini membuat anak perusahaan di Singapura, Coaltrade kata Yustinus. Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Service International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara yang dijual ke Negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10%, sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batubara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak yang lebih tinggi hingga mencapai 50% rata-rata per tahun. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Di sisi lain *Global Witness* juga menunjuk peran Negara sebagai suaka pajak yang memungkinkan Adaro dapat mengurangi pajak hingga senilai 14 juta dolar AS per tahunnya.

Tax Avoidance mendesak untuk diteliti karena *Tax Avoidance* masih 1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

dilakukan di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia. (Dikutip Jumat, 28 September 2020, [Sri Mulyani Geram Banyak Perusahaan Lakukan Penggelapan Pajak : Okezone Economy](#)). Banyak Perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak. *Tax avoidance* menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain dengan adanya tindakan penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau tax

avoidance ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul

“ Pengaruh *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020) “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
8. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.

5. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
7. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
8. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh dari *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan mengenai pemahaman *Tax Avoidance*, dengan adanya praktik *Tax Avoidance* dapat menimbulkan penerimaan negara menurun, sehingga diharapkan untuk perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance* harus bijak dalam mengambil keputusan.

2. Bagi Pemerintah

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintahan terkait dengan praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga untuk kedepannya diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan perundang undangan yang jelas terkait dengan praktik *Tax Avoidance*.

3. Bagi Akedemisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu serta referensi terkait dengan praktik *Tax Avoidance*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika *principal* memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian *agent* dapat memanipulasi pelaporan mengenai perusahaan untuk disampaikan kepada *principal*, hal ini dikarenakan setiap manajer mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Teori keagenan digunakan untuk memahami isu *corporate governance* dan manajemen laba (Permata et al., 2018).

Hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara *principal* dan agen atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah tersebut muncul karena baik *principal* dan agen berusaha memaksimalkan kepentingan masing masing. Pemegang saham selaku pemilik perusahaan yang bertindak sebagai *principal* menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasi sedangkan manajer sebagai agen menginginkan imbalan sebesar – besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan baik berupa pemberian kompensasi atau insentif , kenaikan jabatan atau yang lainnya.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir tindakan agent yang dapat dikatakan sebagai tindakan oportunistik dan dapat merugikan kepentingan para principal, maka pihak principal wajib mengeluarkan biaya yang sering dinamakan sebagai biaya agensi (*agency cost*). Menurut Jensen & Meckling (1976), yang dimaksud dengan biaya agensi adalah biaya yang berasal dari keputusan para pemilik perusahaan (*principal*) untuk meminimalisir tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal yang dilakukan oleh agent yang dapat dilakukan dengan cara pengawasan (*monitoring*), *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost*

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memonitor serta mengontrol tindakan para agent yang ditanggung oleh prinsipal. Kemudian bonding cost merupakan biaya yang dibebankan kepada agent untuk menetapkan serta menaati prosedur yang menjamin bahwa agen berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan principal. Sedangkan residual loss merupakan biaya yang dikeluarkan oleh principal karena memang terkadang agent bertindak tidak sesuai dengan kepentingan saham meski sudah dilakukan pemantauan (Noorica & Asalam, 2021).

Manajer sebagai agen akan mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya sedangkan pemegang saham sebagai *principal* hanya memiliki sedikit informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri materi. Adanya asimetri informasi mengakibatkan manajer sebagai agen melakukan tindakan *oportunistik* yaitu tindakan mementingkan diri sendiri (Pradipta & Supriyadi, 2015b).

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara agent dan principal karena agent lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan principal. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan agent untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan agent karena dengan melakukan manajemen pajak maka agent akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan principal.

2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus

memberikan manfaat-manfaat untuk seluruh *stakeholders*-nya. *Stakeholder* merupakan seorang atau sekelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi perusahaan dalam berbagai kebijakan-kebijakan atau keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. *Stakeholder* dibagi menjadi dua bagian yaitu *Stakeholder* internal dan *Stakeholder* eksternal, dimana *Stakeholder* internal meliputi pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan seperti manajer perusahaan, pemegang saham maupun karyawan. Sedangkan *Stakeholder* eksternal yaitu pihak-pihak yang berasal dari luar masyarakat, pemasok, konsumen, pelanggan dan pemerintah, sehingga kelompok *Stakeholder* ini berpengaruh terhadap perusahaan (Amin & Suyono, 2020). Teori *Stakeholder* pelaksanaan CSR tidak hanya dihadapkan kepada pemilik atau kepada pemegang sahamnya saja, tetapi juga terhadap para *Stakeholder* yang terkait dan terkena dampak dari keberadaan perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016b).

Teori stakeholder berhubungan dengan CSR sebagai kegiatan yang berorientasi pada keuntungan, yang dapat mempengaruhi lebih banyak kelompok pemangku kepentingan. CSR yang berbasis stakeholder memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perusahaan yang perlu mendapatkan visibilitas yang lebih besar untuk menjadi sukses. Hal ini membuat perusahaan tidak hanya berfokus pada investor tetapi juga mengatasi kekhawatiran kebutuhan para pemangku kepentingan yang berorientasi nirlaba seperti regulator, karyawan dan masyarakat umum. Hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui CSR bergantung pada strategi komunikasi yang mempertimbangkan dampak CSR terhadap kesejahteraan para pemangku kepentingan.

2.1.3 Corporate Governance

Menurut *Forum For Corporate Governance* pada tahun 2011 menjelaskan bahwa *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya didalam dan diluar perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, atau sistem yang mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* merupakan sistem atau seperangkat aturan yang diharapkan dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam

mencapai tujuannya yang menetapkan hubungan pengurus, pemegang saham, karyawan serta pihak lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Permata et al., 2018).

2.1.3.1 Prinsip – prinsip *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang berdiri pada tahun 2006, menurut lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk *Corporate Governance*. *Corporate Governance* menurut lembaga ini memiliki lima prinsip dasar sebagai berikut :

a. Transparasi

Transparasi merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder* lainnya.

Menurut (Dharma & Ardiana, 2016b) mengemukakan implementasi transparasi dalam praktik bisnis yaitu sebagai berikut :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional.

Menurut Hamdani pada tahun 2016 Akuntabilitas dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai-nilai perusahaan , dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Corporate Governance*.
- 3) Perusahaan menerapkansistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.

- 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat dipelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Corporate Citizen*.

Menurut Hamdani pada tahun 2016 prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi

Independensi merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Fitriani & Sulistyawati, 2020).

Menurut Hamdani pada tahun 2016 pedoman pelaksanaan independensi diantaranya :

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Wibowo pada tahun 2010 kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas.

Pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- 2) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

2.1.3.2 Manfaat *Corporate Governance*

Menurut forum FCGI *Corporate Governance* mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Dengan mengambil keputusan yang baik, peningkatan efisiensi operasional perusahaan serta pelayanan untuk *stakeholder* maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 2) Dapat lebih meningkatkan *Corporate value* dengan mudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
- 3) Investor akan lebih percaya pada perusahaan sehingga akan menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Dengan meningkatkan *shareholdervalue* dan dividen pemegang saham akan merasa puas dengan hasil dari kinerja perusahaan tersebut.

2.1.3.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan penjelasan mengenai sebuah hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil sebuah keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan atas pengambilan keputusan. Adanya mekanisme ini bertujuan untuk mengawasi serta menjamin agar sistem *Corporate Governance* dapat berjalan baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini :

2.1.3.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andin, 2016).

Namun, jika dilihat di sisi lain, kepemilikan institusional sendiri dapat menekankan laba kena pajak perusahaan saat melakukan perencanaan pajak, karena saham beredar dapat menyebabkan adanya beban dividen yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak bagi perusahaan (Rosdiana, 2018).

2.1.3.3.2 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit sebagai berikut :

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 dijelaskan bahwa minimal keanggotaan komite audit sebanyak tiga orang, yaitu satu ketua komite audit yang merangkap sebagai komisaris independen dan dua diantaranya dari pihak eksternal/pihak luar. Dua anggota yang berasal dari pihak luar harus memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan serta menguasainya.

2.1.3.3.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota dewan direksi, dan anggota komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi keindependensian komisaris independen untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

Adanya komisaris Independen akan mencerminkan tingkat kualitas kinerja perusahaan. Komisaris Independen telah memenuhi perdoman *Corporate Governance* adalah yang memiliki paling sedikit 30 % dari jumlah seluruh anggota komisaris untuk menjaga independensi dalam pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan tepat (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.1.3.3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan.

Saham yang dimiliki oleh komisaris, komite audit dan manajemen perusahaan yaitu disebut sebagai kepemilikan saham manajerial, tingginya saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan mampu membuat manajemen untuk melakukan tindakan yang hati – hati sehingga tidak menimbulkan resiko pada perusahaan.

Menurut (Alya Zulfa, 2021) kepemilikan manajerial adalah porsi kepemilikan dari manajer dalam struktur modal perusahaan, dalam hal ini manajer tersebut berperan sekaligus sebagai manajer juga sebagai pemegang saham di perusahaan. Kepemilikan manajerial direpresentasikan dalam laporan keuangan, berapa besarnya persentase kepemilikan oleh manajer. Kepemilikan manajerial dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer yaitu dengan menyesuaikan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, karena diasumsikan bahwa seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Abdul Said et al., 2021).

2.1.4 Corporate Social Responsibility

2.1.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan dijelaskan sebagai tanggung jawab etis yang tercermin melalui perilaku-perilaku moral-etis pengusaha dan para manajer.

Menurut *Corporate Social Responsibility Forum*, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merujuk kepada perilaku para penentu kebijakan perusahaan yang bersifat terbuka dan transparan yang terwujud dalam kepedulian baik terhadap karyawan-karyawati dan masyarakat luas serta terhadap lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk pengertian *Corporate Social Responsibility* yaitu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan itu berdiri, selain terhadap lingkungan sekitar tetapi juga dengan masyarakatnya maupun pihak lainnya, dengan adanya *Corporate Social Responsibility* ini mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat baik untuk bisnis perusahaan sendiri dalam bentuk keuangan untuk perusahaannya sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar.

2.1.4.2 Manfaat Corporate Social Responsibility

Manfaat dari *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan citra perusahaan dengan respon positif yang diberikan oleh para *stakeholders* serta meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar.
- 2) Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya.

2.1.4.3 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Dalam pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang biasa kita sebut *Corporate Social Responsibility*, merupakan sebuah proses yang menjelaskan dampak sosial dan lingkungan di sekitar lingkungan perusahaan itu berdiri terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dilakukan untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan informasi kepada para *stakeholders* agar mendapatkan dukungan untuk keberlangsungan perusahaan, semakin baik pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka akan memberikan dukungan *stakeholders* yang semakin baik pula atas segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan oleh perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Perusahaan selain diwajibkan untuk melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat 22 menyebutkan bahwa perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Pada umumnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia adalah laporan yang berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan sebuah jaringan yang menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan menghasilkan *sustainable report* komprehensif yang secara luas digunakan seluruh dunia. Tujuan utama GRI adalah mengungkapkan 6 dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk (Pradipta & Supriyadi, 2015a).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan (Subramanyam, 2020). Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau

modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.

2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan laba merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. Manajer keuangan yang menggunakan pecking order theory dengan laba ditahan sebagai pilihan kedua serta penerbitan saham sebagai pilihan ketiga, akan selalu memperbesar profitabilitas untuk meningkatkan laba. Profitability ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima (Putong, 2020).

Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri. Dengan adanya berbagai cara dalam penelitian profitabilitas suatu perusahaan tidak mengherankan bila ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam menentukan suatu alternatif untuk menghitung profitabilitas. Hal ini bukan keharusan tetapi yang paling penting adalah profitabilitas mana yang akan digunakan, tujuannya adalah semata-mata sebagai alat mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam perusahaan yang bersangkutan.

2.1.5 Leverage

Leverage adalah salah satu rasio yang menunjukkan besarnya komposisi hutang sebuah perusahaan yang dapat berfungsi dalam mengelola aktivitas

operasinya (Rosdiana, 2018). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan terhadap hutang dalam membiayai aset aset yang dimiliki oleh perusahaan, sebaliknya apabila perusahaan memiliki hutang yang rendah hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membiayai aset aset nya menggunakan modal sendiri (Pradipta & Supriyadi, 2015a). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dalam perusahaan, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap laba perusahaan yang akan berkurang karena perusahaan harus membayarkan beban bunga kepada pihak ketiga. Perusahaan memiliki laba rendah akan berdampak terhadap beban pajak yang dibayarkan akan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada penurunan upaya dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Susanti, 2018).

2.1 Sales Growth

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan yang terdapat dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun yang dapat memberikan informasi mengenai prospek perusahaan. Pertumbuhan penjualan ini dapat diukur dengan cara membandingkan penjualan di tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dan penjualan tahun sebelumnya. Perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun sebelumnya, pengukuran ini dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat penjualan dalam sebuah perusahaan (Susanti, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Tax Avoidance* sudah banyak dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Pahursip & Simarmata (2022)	Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Sales Growth,	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hasil uji statistik terbukti bahwa

	<p>Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CSR ● <i>Leverage</i> ● <i>Sales Growth</i> 	<p>Corporate Social Responsibility (CSR), Sales Growth, dan Leverage positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance yang diprosikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR).</p>
<p>Safitri & Damayanti (2021)</p>	<p>Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi</p>	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : <i>Sales Growth</i></p> <p>Moderasi : Kepemilikan Institusional</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa ketika sales growth suatu perusahaan</p>

			<p>tinggi maka perusahaan tersebut justru memanfaatkan praktik tax avoidance. Study ini juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh sales growth terhadap tax avoidance.</p>
Permata, et al (2018)	<p>Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance</p>	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Size ● Age ● <i>Leverage</i> ● <i>Sales Growth</i> ● <i>Profitability</i> 	<p>Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ukuran, Umur, Profitabilitas, Leverage, dan Penjualan</p>

			Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Mahdiana & Amin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • <i>Leverage</i> • <i>Sales Growth</i> • <i>Profitability</i> 	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa (1) profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (2) leverage memiliki dampak positif yang signifikan pada penghindaran pajak (3) ukuran perusahaan tidak</p>

			mempengaruhi pajak penghindaran dan (4) pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi variabel penghindaran pajak.
Permata, A., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. (2018)	Pengaruh <i>Size, Age Profitability, Leverage dan Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Profitability</i> ● <i>Leverage</i> ● <i>Sales Growth</i> 	Hasil Penelitian ini adalah <i>Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Ida Ayu, Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : <ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran Perusahaan 	Hasil Penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Umur Perusahaan • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Pertumbuhan Penjualan 	<p>Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p><i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
Khoirul Naim, Nanang Agus (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan 	<p>Hasil Penelitian ini adalah Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax</i></p>

		Periode 2016-2018)	<p>Institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen • Komite Audit • Kualitas Audit • Kepemilikan Manajerial 	<p><i>Avoidance</i></p> <p>Sedangkan untuk Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>;</p>
I Hendy Dermawan, I Made Sukartha (2014)	Gede	<p>Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return Of Asset</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak</p>	<p>Dependen : Penghindaran Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governance, Leverage,</i> • <i>Return Of Asset</i> • Ukuran Perusahaan 	<p>Hasil Penelitian ini adalah <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Return Of Asset</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Ukuran Perusahaan</p>

			berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Diah Ayu Pradita, Supriyadi	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Social Responsibility</i> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • <i>Komisaris Independen</i> 	Hasil Penelitian ini adalah Variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan variabel <i>Leverage</i> dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

<p>I Made Surya Dharma, Putu Agus Ardiana (2016)</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Deviden : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i>, • Intensitas Aset Tetap, • Ukuran Perusahaan, • Koneksi Politik 	<p>Hasil penelitian ini adalah <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
--	--	---	--

Sumber : Jurnal Penelitian

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor menimbulkan *agency problem* sehingga diperlukan penerapan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan laba yang besar tentu beban pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax*

avoidance agar bisa membayar beban pajak yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian Noorica & Asalam (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mengarah positif terhadap tax avoidance, artinya bahwasanya apabila semakin tinggi kepemilikan institusional dalam sebuah instansi, maka kepemilikan institusional akan mengawasi perusahaan semakin ketat pada pihak pengelola manajemen perusahaan dan bertanggung jawab dalam mengawasi perusahaan yang akan berdampak pada nilai CETR, maka perusahaan diindikasikan tidak melangsungkan kegiatan tax avoidance. Perusahaan dengan kepemilikan tinggi, maka kepemilikan institusional tersebut bakal mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan yang dikelolanya berlangsung baik serta sesuai dengan aturan yang berjalan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh melangsungkan tax avoidance. Dengan begitu dengan keberadaan kepemilikan institusional pada instansi dapat meminimalisir adanya kegiatan tax avoidance. Dengan begitu kepemilikan institusional berpengaruh pada tax avoidance.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Agent berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena

memiliki tanggung jawab yang berat, agent menuntut principal untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan agent, salah satunya yakni tugas komite audit.

Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Penelitian dari Gaol & Pranowo (2021) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dalam hal pembentukan komite audit peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia mengenai Pedoman Kerja Komite Audit, Komite audit setidaknya terdiri dari minimal tiga (3) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan emiten atau perusahaan publik. Komite audit dengan anggota lebih sedikit tentunya dapat bergerak dengan leluasa. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang .saham tidak secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal hanya mendanai dan memfasilitasi aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh manajemen

perusahaan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya milik perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi *two tier system* untuk fungsi dewan komisaris dan dewan direksi berbeda sehingga permasalahan untuk CEO *duality* bisa dihindarkan. Saat pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dewan komisaris independen bertanggung jawab sangat besar dalam perusahaan, apabila semakin tinggi persentase komisaris independen dalam perusahaan maka independensinya juga akan semakin tinggi hal ini terjadi karena tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali mengakibatkan kebijakan untuk *Tax Avoidance* semakin rendah, namun apabila semakin rendah persentase komisaris independen dalam perusahaan maka independensinya akan semakin rendah karena berkaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali maka kebijakan untuk *Tax Avoidance* sangat tinggi.

Penelitian Wahyudi & Rustinawati (2020) menunjukkan bahwa Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Pembentukan komisaris independen akan membuat pengawasan ketat terhadap manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin banyak komisaris independen diharapkan *corporate governance* dalam perusahaan meningkat dan mampu mendorong manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak di perusahaan.

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Pradipta & Supriyadi, 2015b). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, pihak manajemen akan membuat manajer menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial untuk menyetarakan kedudukan manajer dengan

pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut dapat membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta meningkatkan pengawasan akan jalannya kegiatan ekonomi di perusahaan. Jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Jika persentase kepemilikan atas saham di perusahaan semakin besar, maka keterlibatan perusahaan dalam melakukan tax avoidance akan semakin kecil. ETR merupakan alat ukur dari tax avoidance, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Pada suatu perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, alhasil manajer tersebut bakal mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin, dengan cara mengawasi kegiatan perusahaan secara ketat. Maka dengan keberadaan kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan dapat mengurangi adanya tindakan tax avoidance. Hal tersebut senada yang dinyatakan oleh (Sari et al., 2021) bahwa apabila seorang manajer memiliki kepemilikan atau saham pada perusahaan, maka manajer bakal lebih waspada saat pengambilan keputusan kandi karena keputusan tersebut bakal pengaruhi manajer tersebut, dengan begitu manajer bakal mengambil keputusan dengan tepat demi kesejahteraan perusahaan.

Penelitian Setiawan et al (2021) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan penelitian penulis kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance hal ini dikarenakan manajerial memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profit perusahaan, sehingga manajerial mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan menghalangi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang disebut tax avoidance.

H4 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

2.3.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*.

Praktek CSR, dalam pandangan teori legitimasi, merupakan bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam teori stakeholder, untuk menjaga keberlangsungannya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* karena merupakan sebuah tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan tersebut berdiri dengan membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab dan mendukung program pemerintah dalam bidang infrastruktur yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemerintah, dimana perusahaan akan menjalankan usahanya sampai kapanpun. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perusahaan diharapkan semakin kecil perusahaan untuk melakukan memaikan laba agar menjadi kecil untuk kepentingan pajak.

Penelitian pradita (2020) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H6 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.6 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pada penelitian ini Return On Asset (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA semakin tinggi nilai profitabilitasnya, semakin besar profitabilitas maka beban pajak yang ditanggung semakin besar. Menurut Chen et.al (2010) menyatakan hubungan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak

sebagai berikut: “Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya beban pajak seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Adapun hubungan profitabilitas dengan agresivitas pajak yaitu Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar juga jumlah pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sehingga ada kecenderungan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak.

Menurut Hidayah et al. (2020), profitability berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dikarenakan perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan agar terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Fauzan et al. (2019), perusahaan yang mempunyai laba besar tidak akan melakukan tax avoidance karena perusahaan akan mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya. Noviyani dan Muid (2019) berpendapat berpengaruh negatif berarti semakin tinggi profitability atau ROA maka semakin rendah praktik tax avoidance. Hal tersebut dikarenakan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenakan pajak.

H5 : Profitabilitas berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*

2.3.7 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah perbandingan antara utang jangka pendek dengan total aset dalam perusahaan (Pradipta & Supriyadi, 2015a). Apabila dalam perusahaan *leverage* sangat tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung terhadap utang membuat bunga hutang semakin tinggi, beban bunga akan mengurangi penghasilan dan memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan oleh

perusahaan sehingga sangat kecil perusahaan akan melakukan *tax avoidance* (Wibawa, 2020).

Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan lebih memakai pendanaan dari sisi utang daripada ekuitas. Penyebabnya adalah karena beban bunga yang timbul dari pendanaan berupa utang dapat dikurangkan secara fiskal. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7 :*Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.8 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut signaling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan.

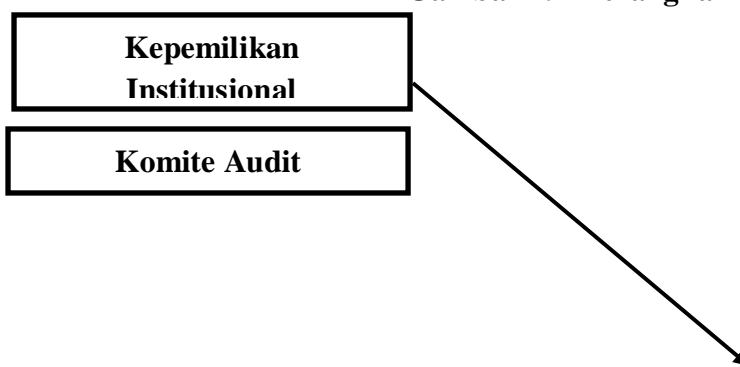
Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam periode sebelumnya dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi penjualan dimasa yang akan datang. Semakin besar penjualan yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga dalam membayar pajaknya juga semakin besar,hal ini akan memicu perusahaan untuk memainkan laba agar menjadi kecil, sehingga pajak yang dibayar pun menjadi kecil.Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

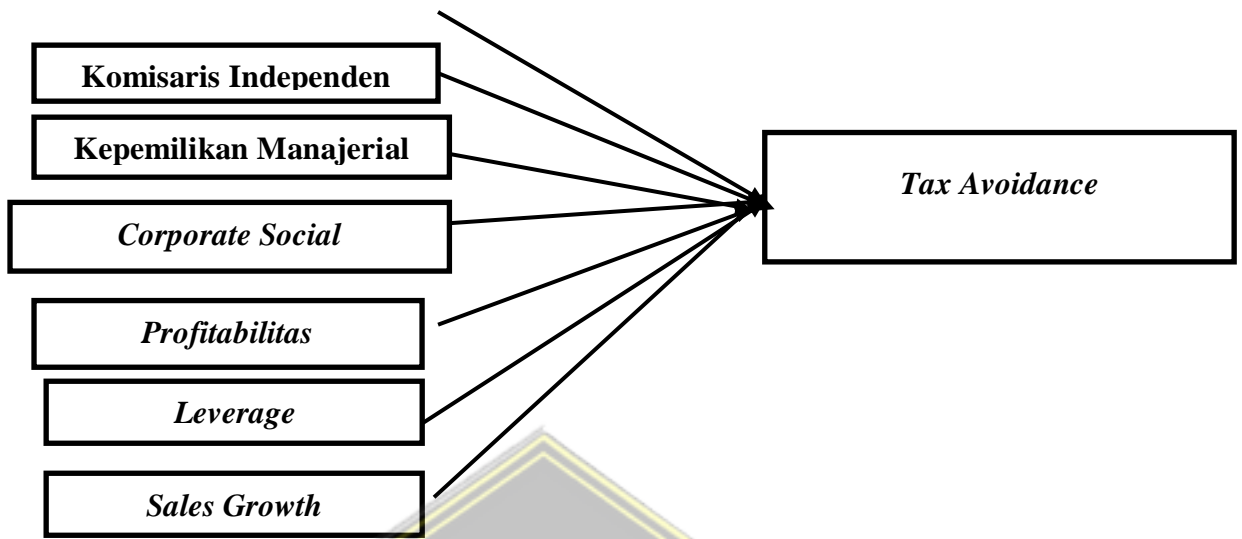
H8 :*Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri dari variabel independen (kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, *corporate social responsibility*, *leverage* dan *sales growth*), serta variabel dependen (*tax avoidance*), kerangka pemikiran dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian hubungan kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth*. Sementara variabel dependennya adalah *Tax Avoidance*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada pengujian hipotesis untuk menganalisis variabel, penggunaan data-data yang terukur, serta alat analisis statistik (Sugiyono, 2018). Pada akhir penelitian akan diperoleh kesimpulan yang diperoleh dari pengujian hipotesis tersebut berdasarkan teori dan fakta yang mendukung. Pendekatan hal ini dilakukan dengan pengujian hipotesis, pengukuran data serta pembuatan kesimpulan. Tujuan dari penulisan kuantitatif ini adalah untuk menguji sebuah teori atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif, kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penemuan dan pemecahan masalah penelitian (Sugiyono, 2018).

Penelitian kuantitatif juga sering disebut sebagai penelitian positivis (*positivist*) yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan statistika (Sujarweni, 2019). Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear. Analisis linear berganda dipilih agar pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen dapat diketahui.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau sekedar objek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yang menyangkut ketersediaan data, perbedaan karakteristik, dan sensitivitas terhadap kejadian. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berarti laporan keuangannya telah terpublikasi sehingga ketersediaan dan kemudahan memperoleh data dapat terpenuhi dan perusahaan pertambangan lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap masyarakat sekitar sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar dalam mengeksplorasi sumber daya alam dalam mengembangkan pertambangan. Untuk itu, perusahaan pertambangan banyak masuk ke pasar modal untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangannya. Alasan memilih perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan sifat dan karakteristik industrinya berbeda dengan industri lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sumber daya tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2018) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Kedua teknik sampling tersebut diantaranya adalah *probability sampling* dan *non probability sampling*.

(Sugiyono, 2018) menjelaskan *definisi probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel (teknik sampling) yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode *non probability sampling* dengan teknik pengambilan data menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2018) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020 dan memiliki kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang mendukung penelitian.

Berdasarkan metode yang telah ditentukan oleh penulis maka kriteria yang digunakan untuk menentukan pengambilan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar selama 6 tahun berturut – turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020.
2. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan lainnya, yaitu *Corporate Governance* (X1), *Corporate Social Responsibility* (X2), *Profitabilitas* (X3), *Leverage* (X4), *Sales Growth* (X5) dan *tax avoidance* (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.

Sumber data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data yang sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai serta mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan dari tahun 2015 s.d 2020 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengakses website www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian diperlukan sejumlah data baik dari dalam maupun luar perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa informasi dan pengetahuan yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal maupun makalah yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan landasan teori.

b. Dokumentasi (*Documentation*)

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kemudian melakukan penelaahan data-data yang berkaitan dengan informasi keuangan untuk mengetahui nilai *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan.

3.5 Definisi Variabel dan Operasionalnya

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel dependen dan variabel independen:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel lain. Dalam penelitian ini untuk variabel dependennya adalah *tax avoidance* untuk mengukur *tax avoidance* penulis menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menggambarkan persentase beban pajak perusahaan dari laba sebelum pajak. Pengukuran dengan menggunakan ETR dapat menjawab adanya permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai ETR menunjukkan bahwa semakin besar penghindaran pajak yang dilakukannya begitu sebaliknya (Ismini Aulia, 2020). Dengan menggunakan rumus berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian ini variabel independennya sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase, kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*. Besar kecilnya suatu kepemilikan akan mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015). Kepemilikan Institusional diukur dengan membagi saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan dikarenakan hal ini akan menunjukkan seberapa besar kepemilikan saham oleh pihak institusi sehingga mampu menunjukkan seberapa besar kekuasaan

yang dimiliki pihak institusi. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

2. Komite Audit

Komite audit memiliki tujuan untuk dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Sandy & Lukviarman, 2015). Semakin banyak komite audit maka dalam melakukan pengawasannya semakin ketat terhadap pihak manajemen perusahaan, sehingga rumus komite audit yaitu dengan mengetahui seluruh jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit Perusahaan}$$

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja para manajemen, apabila didalam sebuah perusahaan tidak memiliki dewan komisaris independen maka peluang para manajemen untuk melakukan manipulasi akan sangat besar, pengukuran dewan komisaris independen dapat dilakukan dengan menggunakan rasio atau antara jumlah anggota dewan komisaris dibagi dengan total anggota dewan komisaris, sehingga mampu untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara total jumlah komisaris independen dengan total keseluruhan dewan komisaris (Sandy & Lukviarman, 2015). Perhitungannya dapat menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen, Subagyo (2018). Perhitungannya dapat menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

5. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *check list* yang mengacu dengan *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu jumlah item yang diharapkan bisa diungkapkan oleh perusahaan sebanyak 78 item. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila *i* diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item *i* tidak diungkapkan maka akan diberikan nilai 0 pada *checklist* (N. Dewi, 2019) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CSR_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

CSR_j : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j.

∑X_{ij} : Nilai 1 jika item *I* diungkapkan ; nilai 0 jika item *i* tidak diungkapkan.

n_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 78

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar laba yang diperoleh dengan aset yang dimiliki. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah dengan menggunakan

ROA. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA dikarenakan ROA lebih mampu memproduksi Rasio Profitabilitas dibandingkan dengan yang lainnya, dikarenakan ROA mengukur antara Laba Bersih dengan Total Aset. Rumus ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

7. Leverage

Leverage adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan utang jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan, variabel ini juga diproksikan dengan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), hal ini dikarenakan DAR mampu memproyeksikan variabel leverage dengan tepat dikarenakan DAR menggunakan perbandingan Total Hutang dengan Total Aset. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

8. Sales Growth

Sales Growth adalah pertumbuhan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang diukur dengan menghitung penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya, dengan menggunakan perhitungan ini dapat memberikan nilai atau data sales growth secara akurat. Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales } t - \text{Sales } (t - 1)}{\text{Sales } t - 1}$$

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rerata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari sejumlah data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Nilai minimum adalah nilai terkecil dari sejumlah data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Nilai rerata (*mean*) adalah nilai rata-rata dari sejumlah data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan variasi data yang dianalisis pada suatu periode tertentu. Statistik deskriptif berguna sebagai alat untuk menganalisis data, dengan cara menggambarkan sampel yang ada tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Uji (K-S). Dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀: Data residual berdistribusi normal

H_a: Data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai variabel signifikansi atau *asymptotic significance* (2 tailed) jauh di bawah $\alpha = 0,05$ maka H₀ ditolak atau data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen bukan berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan regresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas adalah nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan rank spearman. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW). Metode Durbin-Watson (DW), yaitu untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *log* di antara variabel independen. Dengan demikian, hipotesis yang akan uji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R square)

Menurut (Ghozali, 2018), koefisien determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan yang mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.6.4 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang dilakukan apabila dalam penelitian terdapat beberapa variabel independen. Persamaan regresi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien arah regresi
X_1	= Corporate Governance
X_2	= Corporate Social Responsibility

X3	= Profitabilitas
X4	= Leverage
X5	= Sales Growth
e	= Error term

a. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

- a) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$
Artinya tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b) $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$
Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- c) Menemukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F.
- d) Menentukan tingkat signifikansi (α) misal 5% maka kriteria pengujian adalah:
 - Jika nilai Sig-F $\geq 0,05$, maka H_0 gagal ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.
 - Sebaliknya jika Sig-F $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen

c. Uji Parsial (Uji t-statistic)

Menurut (Ghozali, 2018), “Uji t (parsial) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Uji t (parsial) digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut :

- Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri pertambangan begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan mendatang. Hal ini disebabkan adanya potensi geologi di Indonesia yang sangat kaya akan bahan tambang. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. Subjek penelitiannya adalah laporan tahunan perusahaan pertambangan yang datanya diambil langsung dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Proses pengambilan sampel penelitian ini digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Proses Penarikan Sampel Penelitian

Kriteria Penarikan Sampel	Jumlah Sampel
Perusahaan pertambangan yang sudah tercatat 6 tahun berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2020	63
Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2020	38
Total sampel yang digunakan dalam penelitian = 6 x 38	228

Sumber : data diolah peneliti (2022)

Tabel 4.2 Daftar Subjek Penelitian

No	Kode dan Perusahaan
1	PT. Adaro Energy Tbk - ADRO
2	PT. Atlas Resources Tbk - ARII
3	PT. Baramulti Suksessarana Tbk -BSSR
4	PT. Bumi Resources Tbk
5	PT. Bayan Resources Tbk
6	PT. Dian Swastatika sentosa Tbk
7	PT. Golden Energy Mines Tbk
8	PT. Harum Energy Tbk - HRUM
9	PT. Indika Energy Tbk - INDY
10	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk - ITMG
11	PT. Resource Alam Indonesia Tbk - KKGI
12	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk - MBAP
13	PT. Bukit Asam Tbk - PTBA
14	PT. Golden Eagle Energy Tbk - SMMT
15	PT. TBS Energi Utama Tbk - TOBA
16	PT. Trada Alam Mineral Tbk - TRAM
17	PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk - CNKO
18	PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk - MBSS
19	PT. Pelita Samudera Shipping Tbk - PSSI
20	PT. Indo Straits Tbk - PTIS
21	PT. Trans Power Marine Tbk - TPMA
22	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk - BIPI
23	PT. Energi Mega Persada Tbk - ENRG
24	PT. Medco Energi Internasional Tbk - MEDC
25	PT. J Resources Asia Pasifik Tbk - PSAB
26	PT. Saranacentral Bajatama Tbk - BAJA
27	PT. Betonjaya Manunggal Tbk - BTON
28	PT. Citra Tubindo Tbk - CTBN
29	PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk - GDST

30	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk - ISSP
31	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk - KRAS
32	PT. Lionmesh Prima Tbk - LMSH
33	PT. Aneka Tambang Tbk - ANTM
34	PT. Bumi Resources Minerals Tbk - BRMS
35	PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS
36	PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk - ALMI
37	PT. Cita Mineral Investindo Tbk - CITA
38	PT. Indal Aluminium Industry Tbk - INAI

Sumber: Olah Data BEI 2022

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata – rata (mean) dan standar deviasi dari masing – masing variabel yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Tax Avoidance*.

Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari beberapa data yang dianalisis dalam periode tertentu. Nilai minimum adalah nilai terendah dari banyaknya data yang dianalisis dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata (mean) adalah rata-rata dari beberapa data yang dianalisis dalam data tertentu.

Standar deviasi untuk menunjukkan hasil variasi data yang dianalisis pada periode tertentu. Semakin tinggi standar deviasi suatu variabel maka data dalam variabel tersebut semakin menyebar dari nilai rata – rata (mean) dan apabila semakin rendah standar deviasi suatu variabel maka data dalam variabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata yang tidak tersebar secara merata.

Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan hasil dari pengolahan Statistik Deskriptif. Melakukan uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Tax Avoidance*.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan_Institusional	228	,000	860,318	36,02850	62,678204
Komite_Audit	228	0	5	3,17	,645
DKI	228	0	5	1,68	,702
Kepemilikan_Manajerial	228	,000	94,591	13,23483	26,318074
CSR	228	,282	,487	,35593	,062750
ROA	228	-64,387	45,558	1,61766	13,906113
DAR	228	,074	622,796	55,13462	48,722433
Sales_Growth	228	-,932	63,020	,60708	4,555338
Tax_Avoidance	228	-10774,237	3968,027	-35,08652	778,803756
Valid N (listwise)	228				

Sumber : data diolah peneliti, 2022.

Analisis dari hasil statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini yaitu 228 data yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Tax Avoidance*.

- a. Kepemilikan Institusional hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 36.02850. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum 0.000 dan 860,318. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 62,678204. Nilai standar deviasi variabel Kepemilikan Institusional lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki tingkat penyebaran data yang merata.
- b. Komite Audit hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,17. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum

- Odan 5. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,645. Nilai standar deviasi variabel Komite Audit lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Komite Audit memiliki tingkat penyebaran data merata.
- c. Komisaris Independen hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 1.68. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum Odan 5. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,702. Nilai standar deviasi variabel Komisaris Independen lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Komisaris Independen memiliki tingkat penyebaran data tidak merata.
- d. Kepemilikan Manajerial hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 1.053 Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum 0.000 dan 94.008. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 26,318. Nilai standar deviasi variabel Kepemilikan Manajerial lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki tingkat penyebaran data yang tidak merata.
- e. *Corporate Social Responsibility* hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,35593. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum 0,282 dan 0,487. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,062750. Nilai standar deviasi variabel *Corporate Social Responsibility* lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki tingkat penyebaran data tidak merata.
- f. Profitabilitas hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 1,61766. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum -64,387 dan 45,558. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 13,906113. Nilai standar deviasi variabel Profitabilitas lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Profitabilitas memiliki tingkat penyebaran data merata.
- g. *Leverage* hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 55,134 Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum 0.074 dan 622,020. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 48,722. Nilai

standar deviasi variabel *Leverage* lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa *Leverage* memiliki tingkat penyebaran data merata.

- h. *Sales Growth* hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,60708. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum -0,932 dan 63,020. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 4,555. Nilai standar deviasi variabel *Sales Growth* lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa *Sales Growth* memiliki tingkat penyebaran data merata.
- i. *Tax Avoidance* hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar -35,086. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum -10774,23 dan 3968,027. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 778,803. Nilai standar deviasi variabel *Tax Avoidance* lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa *Tax Avoidance* memiliki tingkat penyebaran data tidak merata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum, maka selanjutnya akan dilakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu data dan merupakan syarat untuk semua syarat uji statistic. Uji normalitas menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Dasar keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dapat dikatakan normal, dan jika nilai signifikansi lebih

kecil 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data bersifat tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		228
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	766,76945936
Most Extreme Differences	Absolute	,369
	Positive	,295
	Negative	-,369
Test Statistic		,369
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data diolah peneliti, 2022.

Tabel 4.4 merupakan hasil dari uji normalitas. Hasil uji normalitas yang menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi **tidak normal**. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Berdasarkan hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini **belum memenuhi asumsi normalitas**.

Untuk menormalkan data, penulis melakukan cara dengan menghilangkan beberapa data yang diduga **outlier** dengan menggunakan metode *casewise diagnostic*. Adapun hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* sesudah outlier dengan menggunakan metode *exact test montecarlo* dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov (Sesudah Otulier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		172	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,74137494	
Most Extreme Differences	Absolute	,089	
	Positive	,089	
	Negative	-,050	
Test Statistic		,089	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,002 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,119 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	,113
		Upper Bound	,125

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1335104164.

Sumber : data diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* setelah *outlier* maka diperoleh hasil nilai *test statistic* sebesar 0.089 dengan nilai signifikan 0,119 , maka karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data residual pada model regresi telah **berdistribusi normal**.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan multikol, yaitu adanya masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau tolerance value, kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tolerance adalah mengukur variabilitas independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lain. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah apabila tolerance value $< 0,1$ sedangkan VIF > 10 sebaliknya apabila tolerance value $\geq 0,1$ sedangkan VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Tabel berikut menunjukkan hasil multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	,327	1,769		,185	,854	
	Kepemilikan_Institusional	-,003	,003	-,056	-,998	,320	,950
	Komite_Audit	-,923	,307	-,166	-	,003	,986
	DKI	,265	,337	,046	,788	,432	,874
	Kepemilikan_Manajerial	,002	,009	,012	,196	,845	,866
	CSR	2,085	3,527	,033	,591	,555	,956
	ROA	-,155	,020	-,505	-	,000	,742
	DAR	,012	,005	,167	2,627	,009	,744
	Sales_Growth	-,278	,043	-,358	-	,000	,985
					6,496		

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

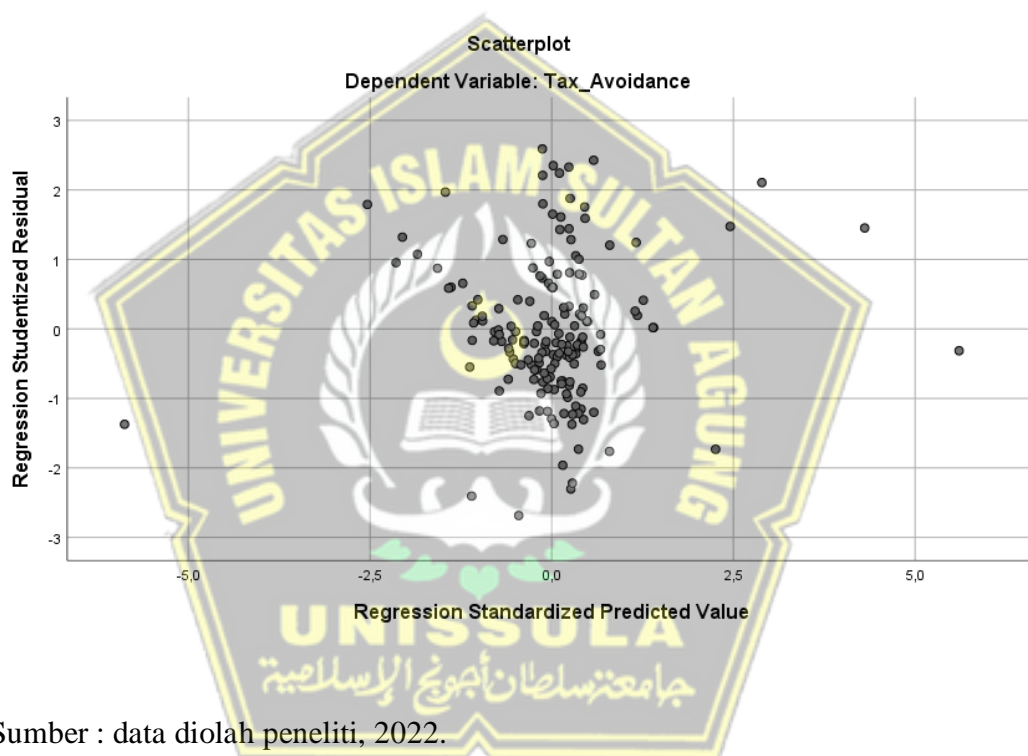
Sumber : data diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10.0 sehingga dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan pengujian multikolinearitas dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen pada penelitian ini, maka tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel-variabel bebasnya karena tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10.0 dan nilai tolerance yang kurang dari 0.10 sehingga model lolos uji multikolinieritas dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji grafik *scatter plot*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel 4.7 Hasil uji *scatter plot* pada model regresi diatas menunjukkan titik-titik data sampel menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Data tersebar baik diatas angka 0 dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi **tidak ditemukan gejala** multikolinearitas antar variabel-variabel bebasnya dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Selain menggunakan uji *scatter plot* penulis melakukan uji gleser. Uji gleser adalah untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen,

yang mana dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Untuk hasil uji gleser bisa dilihat dibawah inibahwa untuk variabel variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,005 maka **tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,691	1,120		2,402	,017
	Kepemilikan_Institusional	-,002	,002	-,064	-,818	,414
	Komite_Audit	-,034	,195	-,013	-,174	,862
	DKI	-,369	,213	-,142	-1,727	,086
	Kepemilikan_Manajerial	-,009	,005	-,129	-1,569	,119
	CSR	1,272	2,233	,045	,570	,570
	ROA	-,013	,012	-,094	-1,053	,294
	DAR	-,002	,003	-,051	-,570	,570
	Sales_Growth	-4,442E-5	,027	,000	-,002	,999

a. Dependent Variable: absres

Sumber : Data diolah peneliti 2022

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan Uji Durbin Watson.

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 ^a	,512	,488		2,807842	1,924

a. Predictors: (Constant), Sales_Growth, Komite_Audit, ROA, Kepemilikan_Institusional, CSR, DKI, Kepemilikan_Manajerial, DAR

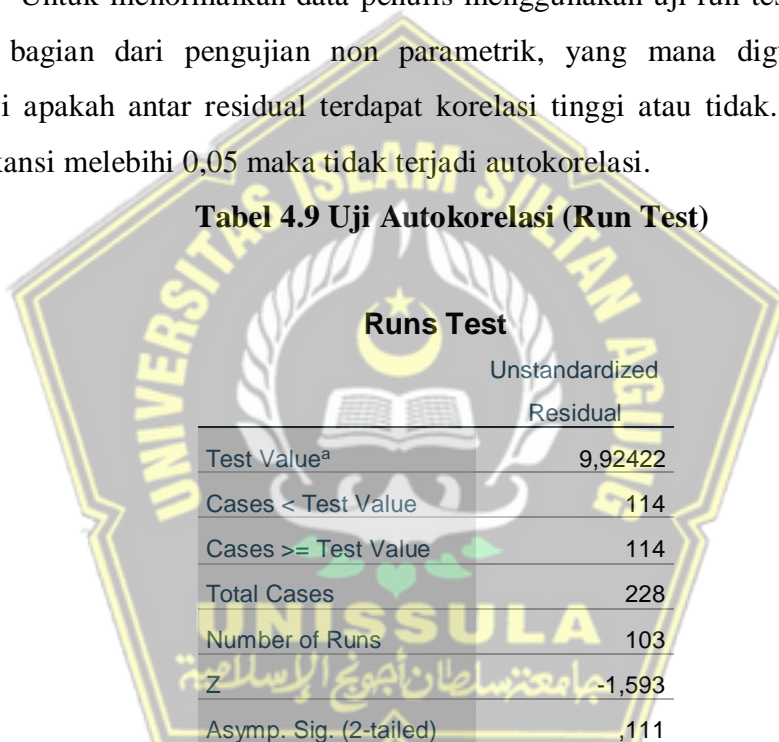
b. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.8 dapat diperoleh nilai DW 1,924 angka tersebut akan dibandingkan dengan nilai signifikansi 5% (n=172) dari angka tabel DW. Terdapat 8 variabel independen (k8), $DL = 1,6544$ $dU = 1,8486$. Karena $DU \leq D \leq 4-D$ hasilnya adalah $1,8486 \leq 1,924 \leq 1,920$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi penelitian ini **terjadi gejala autokorelasi**.

Untuk menormalkan data penulis menggunakan uji run test. Uji run test adalah bagian dari pengujian non parametrik, yang mana digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi tinggi atau tidak. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi (Run Test)



Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	9,92422
Cases < Test Value	114
Cases >= Test Value	114
Total Cases	228
Number of Runs	103
Z	-1,593
Asymp. Sig. (2-tailed)	,111

a. Median

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat untuk nilai signifikansi sebesar 0,913 yang mana lebih besar dari 0,05 maka dalam uji regresi in sudah **tidak terjadi gejala autokorelasi**.

4.2.3 Uji Hipotesis

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, *Profitabilitas Leverage*, *Sales Growth*) terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) maka dilakukan analisis regresi linier berganda. Setelah data diolah menggunakan SPSS diperoleh tabel hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,327	1,769		,185	,854		
	Kepemilikan_Institusional	-,003	,003	-,056	-,998	,320	,950	1,053
	Komite_Audit	-,923	,307	-,166	-	,003	,986	1,015
	DKI	,265	,337	,046	,788	,432	,874	1,144
	Kepemilikan_Manajerial	,002	,009	,012	,196	,845	,866	1,155
	CSR	2,085	3,527	,033	,591	,555	,956	1,046
	ROA	-,155	,020	-,505	-	,000	,742	1,349
	DAR	,012	,005	,167	2,627	,009	,744	1,344
	Sales_Growth	-,278	,043	-,358	-	,000	,985	1,016
					6,496			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,327 - (0,003)X_{1.1 KI} - (0,923)X_{1.2 KA} + (0,265)X_{1.3 DKI} + (0,002) X_{1.4 KM} + (2,085)X_2 CSR + (-0,155) X_3 ROA + 0,012 X_4 LEVE + (-0,278) X_5 SG + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam koefisien regresi diatas, konstanta (b_0) adalah sebesar 0.327 hal ini berarti jika tidak ada perubahan kepemilikan institusional, komite audit,

komisaris independen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, CSR, Leverage dan Sales Growth adalah konstan sebesar 0.327

- b. Nilai kepemilikan institusional sebesar -0.003 maka menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka *tax avoidance* semakin menurun.
- c. Nilai komite audit sebesar -0.923 maka menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai komite audit maka *tax avoidance* semakin menurun.
- d. Nilai komisaris independen sebesar -0.265 maka menunjukkan bahwa semakin tinggi komisaris independen maka untuk *tax avoidance* nya semakin menurun
- e. Nilai kepemilikan manajerial sebesar 0.002, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka untuk *tax avoidance* nya semakin tinggi.
- f. Nilai *Corporate Social Responsibility* sebesar 2.085, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi *corporate social responsibility* maka untuk *tax avoidance* nya semakin naik.
- g. Nilai Profitabilitas sebesar -0.155 maka menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka untuk *tax avoidance* nya semakin turun.
- h. Nilai *leverage* sebesar 0.012 , maka menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka untuk *tax avoidance* nya semakin tinggi.
- i. Nilai *sales growth* sebesar -0.278, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi *sales growth* maka untuk *tax avoidance* nya semakin menurun.

b. Uji R Square

Uji koefisien determinasi adalah salah satu pengujian yang memiliki tujuan untuk melakukan pengukuran sejauh mana variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,716 ^a	,512	,488	2,807842	1,924

a. Predictors: (Constant), Sales_Growth, Komite_Audit, ROA, Kepemilikan_Institusional, CSR, DKI, Kepemilikan_Manajerial, DAR

b. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Sumber :Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,488. Besarnya angka koefisien determinasi (R square) adalah 0.488 atau sama dengan 48.8%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini mampu menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* sebesar 0,488 atau 48.8%, dan sisanya 51.2 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

c. Uji F

Uji F atau uji kecocokan model digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Uji ini juga digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Berikut adalah hasil dari uji kecocokan model dalam penelitian ini :

Tabel 4.12 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1348,729	8	168,591	21,384	,000 ^b
	Residual	1285,088	163	7,884		
	Total	2633,818	171			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

b. Predictors: (Constant), Sales_Growth, Komite_Audit, ROA, Kepemilikan_Institusional, CSR, DKI, Kepemilikan_Manajerial, DAR

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Nilai signifikansi pada tabel 4.12 menunjukkan angka sebesar 0.000 atau lebih dari 0,05, maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini tidak layak digunakan. Uji ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* secara bersama-sama tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.

d. Uji t

Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen (Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*) secara individual atau parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*). Jika hipotesis nol (*null hypothesis*) ditolak berarti koefisien dari variabel bebas tidak sama dengan nol. Artinya, jika terjadi perubahan pada variabel bebas, maka akan mempengaruhi variabel terikat. Tetapi jika t-statistik tidak signifikan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel bebas tidak mampu mempengaruhi variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji t dalam penelitian ini :

Tabel 4.13 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,327	1,769		,185	,854		
Kepemilikan_Institusional	-,003	,003	-,056	-,998	,320	,950	1,053
Komite_Audit	-,923	,307	-,166	-	,003	,986	1,015
DKI	,265	,337	,046	,788	,432	,874	1,144
Kepemilikan_Manajerial	,002	,009	,012	,196	,845	,866	1,155
CSR	2,085	3,527	,033	,591	,555	,956	1,046
ROA	-,155	,020	-,505	-	,000	,742	1,349
DAR	,012	,005	,167	2,627	,009	,744	1,344
Sales_Growth	-,278	,043	-,358	-	,000	,985	1,016
				6,496			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa :

1. Pengujian Hipotesis ke - 1

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh KI terhadap *tax avoidance* yang mana nilai regresinya sebesar 0.003 dengan nilai signifikansi 0,320 dimana nilai signifikansi kurang dari 0,05, untuk hipotesis saya yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Pertambangan **ditolak**

2. Pengujian Hipotesis ke-2

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh komite audit yang mana nilai regresinya sebesar -0.923 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, untuk hipotesis saya yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Pertambangan **diterima**

3. Pengujian Hipotesis ke-3

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh komisaris independen yang mana nilai regresinya sebesar 0.265 dan nilai signifikansi 0,432 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, untuk hipotesis saya yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Pertambangan **ditolak**.

4. Pengujian Hipotesis ke-4

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial yang mana nilai regresinya 0.002 dan nilai signifikansi 0,845 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, untuk hipotesis saya yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di Perusahaan Pertambangan **ditolak**.

5. Pengujian Hipotesis ke- 5

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* yang mana nilai regresinya 2.085 dan nilai signifikansi 0,555 yang

mana lebih dari 0,05 .Demikian hipotesis saya yang menyatakan *Corporare Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* **di tolak**

6. Pengujian Hipotesis ke-6

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas* yang mana nilai regresinya -0.155 dan nilai signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Demikian hipotesis saya yang menyatakan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* **diterima**

7. Pengujian Hipotesis ke-7

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh *leverage* yang mana nilai regresinya 0.012 dan nilai signifikansi 0,009 yang mana kurang dari dari 0,05. Demikian hipotesis saya yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **diterima.**

8. Pengujian Hipotesis ke-8

Berdasarkan tabel 4.13 untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* yang mana nilai regresinya -0,278 dan nilai signifikansi 0.000 yang mana lebih kecil 0,005. Demikian hipotesis saya yang menyatakan *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* **diterima**

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis pertama menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonsia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya tanggung jawab terhadap pemegang saham, kepemilikan institusional akan membuat keputusan yang mensejahterakan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional ini juga merupakan salah satu pengawasan corporate governance dalam mekanisme eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sandy Syeldila dan Niki Lukviarman yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional negatif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis kedua menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal tersebut sesuai dengan teori komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Khoirul Amin & Nanang (2020) yang menunjukkan komite audit positif tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis ketiga menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Khoirul Amin & Nanang (2020) yang menunjukkan komisaris independen positif tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis keempat menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini sama dengan teori yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer akan memungkinkan agar manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusannya karena manajer berperan sekaligus sebagai pemilik. Manajer akan sangat memperhatikan segala akibat yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusannya seperti pengambilan

keputusan mengenai perpajakan manajer akan menginginkan pajak yang optimal namun tidak melawan undang undang yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari khoirul Amin & Nanang (2020) yang menunjukkan kepemilikan manajerial negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak . Tinggi rendahnya kepemilikan saham tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis kelima menguji apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya *corporate social responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial juga lingkungan perusahaan kepada semua pemangku kepentingan. Pajak adalah elemen utama dari CSR yang digunakan sebagai lindung nilai terhadap sentimen publik. Pengungkapan CSR dianggap sebagai suatu cara untuk mengefisienkan beban pajak serta menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan, karena CSR dapat membangun kepercayaan para stakeholder dan masyarakat. CSR merupakan suatu tindakan yang digunakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengeluarkan biaya-biaya penelitian sebagai pengurang pendapatan, karena pajak memperbolehkan biaya penelitian sebagai biaya yang dimasukkan ke dalam laporan CSR.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Pahursip & Simarmata (2022) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis kelima menguji apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.3.6 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas menjadi salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam satu periode dalam tingkat penjualan, aset dan modal saham. Salah satu rasio profitabilitas adalah rasio ROA atau return on assets. Teori agensi akan mendorong agent untuk meningkatkan laba perusahaan, saat laba yang diperoleh besar, jumlah pajak akan meningkat juga sesuai dengan peningkatan laba. Agent yang mana adalah manajemen pengelola perusahaan akan terus mengelola beban pajaknya sehingga tidak mengurangi kompensasi kinerja agent karena laba perusahaan yang akan berkurang karena beban pajak yang timbul. Selain itu juga terdapat Teori pecking order yang menyebutkan perusahaan lebih memilih pendanaan internal agar dapat memperoleh insentif dari pengelolaan aset yang dapat mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Mahdiana & Amin, 2020) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.3.7 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis ketujuh menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2015-2020. Hasil penelitiannya *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage adalah rasio keuangan yang menjelaskan kaitan antara hutang perusahaan terhadap modal ataupun aktiva perusahaan. Rasio leverage menjelaskan sumber dana operasional yang dipakai oleh perusahaan. Rasio leverage pun memperlihatkan risiko yang akan didapat pihak perusahaan. Rasio leverage ialah menilai bagaimana perusahaan memanfaatkan hutangnya untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan.

Hutang yang tinggi dalam perusahaan akan dipandang buruk oleh investor dan kreditur apabila tidak mampu menunjukkan laba yang baik, hal ini

akan berdampak pada dana perusahaan dimasa yang akan datang, maka pihak manajemen akan berhati hati dalam memainkan laba dan tidak berani mengambil risiko akan hutang yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance* (Susanti, 2018).

Hasil penelitian inisejalan dengan penelitian dari khoirul Amin & Nanang (2020) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak .

4.3.8 Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance.

Hipotesis delapan menguji apakah *sales growth*berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2015-2020.Hasil penelitiannya *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini berlawanan dengan teori bahwa penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya.Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Semakin tinggi sales growth perusahaan akan terjadi peningkatan laba perusahaan sehingga akan sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggung, dari peningkatan tersebut akan menjadi perhatian dari petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi sales growth akan semakin besar pula jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Safitri & Damayanti (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa ketika sales growth suatu perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut justru memanfaatkan *tax avoidance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
2. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
3. Komisaris Independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
4. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
5. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. *Profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
7. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.
8. *Sales Growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI th 2015-2020.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih terbilang terbatas dikarenakan hanya menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris

independen, kepemilikan manajerial, *profitabilitas, corporate social responsibility, leverage, dan sales growth*.

2. Sampel penelitian ini masih terbatas hanya menggunakan perusahaan pertambangan.
3. Metode penelitian ini menggunakan koefisien determinasi dengan 0,488 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap dependen sebesar 48,80 % artinya dari semua variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat.
4. Hasil penelitian ini hanya sebagai informasi awal, akan tetapi bukan sebagai penentu pengambilan keputusan.

5.3 Saran

Dari keterbatasan yang ada maka diperlukan saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian misalnya menambah kategori perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mampu mempengaruhi *Tax Avoidance*.
3. Perusahaan disarankan agar lebih berhati – hati melakukan pengambilan keputusan yang mampu mempengaruhi *Tax Avoidance* dan yang nantinya berdampak terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248–259.
- Amrulloh, A., & Amalia, A. D. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Achmad. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 167–184.
- Deddy Dyas Cahyono,Rita Andin, K.R.(2016).Pengaruh Komite Audit,Kepemilikan Institusional,Dewan Komisaris,Ukuran Perusahaan (Size),Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013.*journal Of Accounting*,2(2), 141-156.
- Dewinta,I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas,Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3),1584-1615.
- Dharma,I.M.S., & Ardiana, P.A (2016a).Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,15,584-613.
- Dharma,I.M.S,&Ardiana,P.A. (2016b). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.*E-Jurnal*

Akuntansi Universitas Udayana,15,584-613.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463>

Fitriani,A.,& Sulistyawati, A.I.(2020).Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.*Solusi*,18(2), 143-161.

Ghozali.(2018).*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.Badan Penerbit-Undip.

Hayati Yosita Okmawati, R., & Dharma Negara, S. (2019). Analisi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.*Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 4(1), 37–48. www.idx.co.id.

Isniani Aulia, E.M (2020). Pengaruh Profitabilitas,leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.*Akuntansi Dan Keuangan*, 2(0),1 s.d12. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>.

N.Dewi, S. (2019).Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening.*Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 21(2), 144-150.

Noorica,F., & Asalam, A.G(2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2),2021.

Permata, A.D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E.M.(2018). Pengaruh Size Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.*Jurnal*

Akuntansi Dan Pajak,19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>.

Pradipta, D.H., & Supriyadi. (2015a).Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR),Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.*Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*,Vol.XV(No.1), PP.1-25.

Pradipta,D.H.,& Supriyadi. (2015b). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR),Profitabilitas,Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.*Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.XV(No.1), PP.1-25.

Pramudya,A (2007).Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen.28.

Putong,I. (2020).*Economics (Pengantar Mikro dan Makro) Edisi 5*.Mitra Wacana Media.

Rosdiana.(2018). Pengaruh Capital Intensity,Leverage, Kepemilikan Institusional,Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.*Akuntansi*,1-19.

Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021).Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi.*Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175–216. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p175-216>.

Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur.*Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2),85-98.

<https://doi.org/10.20885/jai.voll9.iss2.art1>

Sari, W. N., Murtono, & Ismaya, E. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015 -2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2255–2262.

Subramanyam.(2020).*Analisis Laporan Keuangan*.Salemba Empat.

Sugiyono.(2018).*Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*.Pustaka Baru Press.

Sukartha,I.G.H.T.H.A.M.(2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.*Akuntansi*,9.1, 143-161.<https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>.

Susanti,E.(2018).Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.*Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018*,1-108.

Wibawa, Y.G.P.(2020).Pengaruh Corporate Social Responsibility,Leverage dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.1-113.